

**IMPLEMENTASI ASAS TERTIB KEPENTINGAN UMUM DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**

(Studi di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Tiyas Febriyanti
1621020004**

Jurusan: Siyasaah Syar'iyyah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**IMPLEMENTASI ASAS TERTIB KEPENTINGAN UMUM DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**

(Studi di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Nama: Tiyas Febriyanti
NPM: 1621020004**

Jurusan: Siyasaah (Hukum Tata Negara)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hi. Muhammad Mukri, M.Ag.
Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/ 2021M**

ABSTRAK

Desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa. Apabila pembangunan infrastruktur Desa dalam pelaksanaannya sesuai dengan asas tertib kepentingan umum pada saat dijalankannya, maka akan terwujud pula pembangunan nasional yang baik, karena Desa merupakan bagian terbawah dari unsur pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi asas tertib kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus? 2) Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap upaya pelaksanaan asas tertib kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa? Adapun penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi asas tertib kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan asas tertib kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur Desa pada Pekon Tegal Binangun Kabupaten Tanggamus.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis dengan menggunakan pengolahan data wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (menggambarkan) yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Data yang telah diperoleh diuji dengan metode pengujian data triangulasi.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yaitu, 1) Penerapan asas kepentingan umum sudah sesuai namun belum maksimal dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur Desa. berdasarkan upaya penerapan asas tertib kepentingan umum harus mencakup aspirasi, akomodatif dan selektif dalam pembangunan desa. 2) Berdasarkan pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan asas tertib kepentingan umum haruslah merujuk kepada kemaslahatan umum serta mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan khusus. Melaksanakan kemaslahatan umat dengan cara melaksanakan asas tertib kepentingan umum di mana sebelum menentukan pembangunan haruslah mengutamakan konsep syura atau musyawarah, keadilan, dan tidak bertentangan dengan penetapan aturan dalam melaksanakan pembangunan.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyatakan bahwa:

Nama : **Tiyas Febriyanti**

TTL : Mulyosari, 07 Februari 1998

NPM : 1621020004

Judul Skripsi : Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat hasil penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya sebuah rekayasa dan agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 November 2020

Tiyas Febriyanti
NPM. 1621020004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama:

Nama : Tiyas Febriyanti

NPM : 1621020004

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syari'ah

**Judul : Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum
Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di
Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo
Kabupaten Tanggamus)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I

NIP. 196210221993031002

NIP. -

**Mengetahui
Ketua Jurusan**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI ASAS TERTIB KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”** disusun oleh Nama: Tiyas Febriyanti, NPM: 1621020004, Program Studi: Siyasaah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara), Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Jayusman, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H.

(..E.R.G...)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag.

(.....)

Penguji III : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**



**Dr. M. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”

(Q.S An-Nisa: 58).



PERSEMBAHAN

Persembahan karya sederhana ini kepada orang yang sangat penulis cintai, sayangi dan hormat tak terhingga:

1. Kepada orang tuaku ayahanda Turyono dan ibu Sudiharti, sebagai tanda bakti atas cinta kasih dan tanda terima kasih atas tiada henti-hentinya yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan yang diberikan kepada penulis juga pengorbanan, kesabaran, ketulusan kasih sayang, dan segenap jasa-jasanya berupa moral maupun materil yang tak terbilang demi mewujudkan cita-cita penulis.
2. Adikku tercinta Syahrani, terima kasih atas dukungannya, motivasi dan selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi ini, dan tidak lupa juga terima kasih kepada keluarga besar tercinta yang selalu menginspirasi penulis untuk semangat dalam menggapai cita-cita.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tiyas Febriyanti, dilahirkan pada 07 Februari 1998 di Desa 16 Polos Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Penulis adalah anak pertama dari 2 bersaudara, buah hati dari perkawinan pasangan bapak Turyono dan ibu Sudiharti. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar di (SD) Negeri 2 Metro Barat, Kota Metro tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010
2. Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di (SMP) Negeri 9 Metro Barat Kota Metro dan lulus pada tahun 2013
3. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di (SMA) Negeri 2 Metro Barat Kota Metro dan lulus pada tahun 2016
4. Pada tahun yang sama penulis diterima melalui jalur undangan atau SPAN PTKIN di Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Aktivitas organisasi yang penulis lakukan pada saat menjadi mahasiswa Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung adalah mengikuti organisasi eksternal pencak silat Merpati Putih, penulis mendapatkan beasiswa BI pada semester 5 dan bergabung dengan komunitas yang di peruntukan kepada penerima beasiswa BI atau lebih dikenal dengan Generasi baru Indonesia (GenBI).

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat taufik, hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa hambanya dari zaman kegelepan ke zaman yang terang benderang saat ini.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)” diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis sadari bahwa tidak akan sanggup menghadapi berbagai macam hambatan dan rintangan yang ada, tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Tanpa itu maka penulis tidak bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berharga ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih secara tulus kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. Hi. M. Mukri, M.Ag. yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Raden Intan Lampung lebih baik serta mewujudkan banyak perubahan dan juga sebagai pembimbing 1.

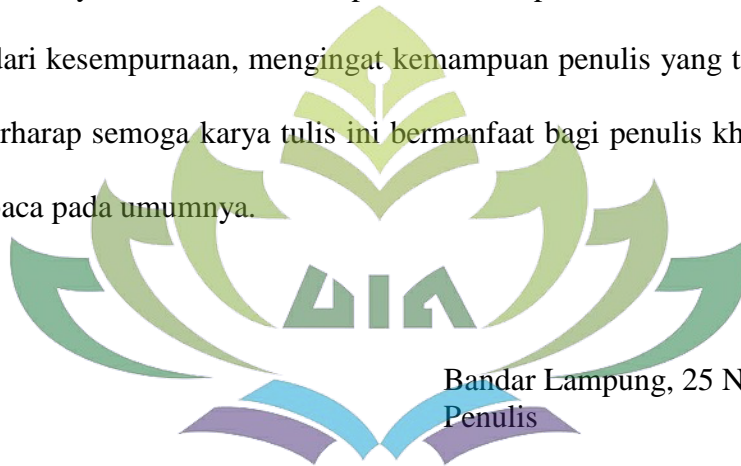
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Bapak Dr. Hi. Khairuddin Tahmid, M.H.
3. Kepala Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Bapak Frenki, M.Si.
4. Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah. S.H.I, M.H.I. Selaku pembimbing 2 yang selalu
memberi dukungan, memberi nasihat dan bimbingan dalam mengerjakan,
menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
5. Bapak Ibu dosen beserta staff akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung.
6. Bapak Purwanto, S.Kom. Penanggung Jawab Pekon Tegal Binangun Tanggamus
yang sudah memberikan pelayanan berupa pemberian data dan wawancara yang
baik kepada penulis untuk memudahkan mengerjakan skripsi ini.
7. Bapak Kharis Ahmad, Juru tulis atau sekretaris Pekon Tegal Binangun Kabupaten
Tanggamus yang sudah memberikan motivasi dan arahan serta pelayanan berupa
pemberian data kepada penulis untuk memudahkan mengerjakan skripsi ini.
8. Bapak Sukidi, Selaku Ketua BHP di Pekon Tegal Binangun Sumberejo
Kabupaten Kabupaten Tanggamus yang sudah memberikan informasi dan sudah
membantu penulis mendapatkan data-data sehingga memudahkan penulis
menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Indah Kurniasari, selaku Kaur Perencanaan Pembangunan Pekon Tegal
Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus yang sudah mau

memberikan informasi dan sudah membantu penulis dalam mendapatkan data-data sehingga memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk para sahabat yang selalu memberi motivasi, dukungan, membantu, dan memberi semangat An-Nisa Magnolia, dan Budi Prasetya, S.T.
11. Kepada semua teman-teman Siyash 2016 Terutama kelas B, Mutia Resta Eliska S.H, Saras Salsabila, Marya, Peni Pebriyanti S.H, Ismi, Risnawati, Daprianto S.H, Nindy, wahyu Ismail S.H, Okta, dan lainnya tanpa terkecuali tak bisa disebutkan satu persatu yang sudah mau **menemani** dan mendengarkan keluh kesah saat pengerjaan skripsi ini dan yang **selalu memberikan semangat**.
12. Untuk keluarga besar dari Ibu dan Bapak Alhamdulillah Skripsi ini bisa diselesaikan di waktu yang tepat dan doakan **serta mensupport** supaya segera mendapat kerja.
13. Untuk keluarga KKN 225 Lala Yonara S.Pd, Fitri Liwandani S.E, Melisa Sari S.Pd, Odi, Irvan, lesta, misda, anjani, zerli, intan, erval, kholid, dan keluarga Tegal Binangun mba mur, bude mar, kang aris, mba septi, vika anggraini, robihan, bapak kadus Deby eka wulanda S.Pd dan lainnya.
14. Untuk teman kontrakan yang telah kebersamai selama penulis berproses Lita Widia S S.T.
15. Untuk saudara Merpati Putih Itera mas Hendy, Rada, Indri, Reza yang telah memberi semangat, serta teman berdiskusi masa depan Rut lima.

16. Untuk organisasi ataupun komunitas yang pernah dan sedang di ikuti penulis, terima kasih sudah mengajarkan hal-hal baru dan telah mengajarkan arti dari sebuah pertemanan, kebersamaan dan kekeluargaan.
17. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang terbatas. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



Bandar Lampung, 25 November 2020
Penulis

Tiyas Febriyanti
NPM.1621020004

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang	5
D. Fokus Penelitian	11
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan Penelitian	12
G. Signifikasi Penelitian	13
H. Metode Penelitian.....	14

BAB II: KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Pembangunan Infrastruktur Desa	
a. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa.....	25
b. Penyelenggaraan Pembangunan Desa.....	30
c. Pembangunan Infrastruktur Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	37
2. Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa	
a. Pengertian Asas Tertib Kepentingan Umum	43
b. Asas Tertib Kepentingan Umum dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.....	44
3. Pembangunan Infrastruktur Terhadap Perspektif Fiqh Siyasah	
a. Pengertian Fiqh Siyasah.....	48
b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	50
c. Pembangunan Infrastruktur Terhadap Perspektif Fiqh Siyasah.....	52
B. Tinjauan Pustaka	54

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Singkat Desa Tegal Binangun	62
2. Keadaan Geografis	63
3. Keadaan Demografis	64
4. Visi dan Misi	67
5. Struktur Organisasi	69
B. Deskripsi Data Penelitian	
1. Gambaran Pembangunan Infrastruktur Desa	72
2. Upaya Penerapan Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa	78

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pekon Tegal Binangun	84
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Pekon Tegal Binangun.....	92

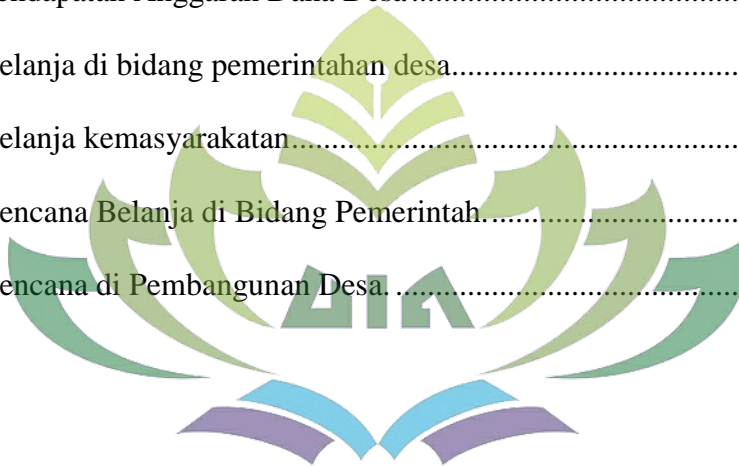
BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	94

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Usia Penduduk Pekon Tegal Binangun	63
Tabel 2. Jenis pekerjaan/mata pencaharian masyarakat Pekon Tegal Binangun	64
Tabel 3. Luas wilayah Pekon Tegal Binangun.	65
Tabel 4. Sarana dan prasarana.....	66
Tabel 5. Pendapatan Anggaran Dana Desa	73
Tabel 6. Belanja di bidang pemerintahan desa.....	73
Tabel 7. Belanja kemasyarakatan.....	74
Tabel 8. Rencana Belanja di Bidang Pemerintah.....	76
Tabel 9. Rencana di Pembangunan Desa.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Jawaban Prariset.
- Lampiran 2. Berita Acara Seminar Proposal.
- Lampiran 3. Surat Keterangan Kasbangpol.
- Lampiran 4. Surat Keterangan Jawaban Izin Riset.
- Lampiran 5. Panduan Wawancara.
- Lampiran 6. Dokumentasi Pembangunan Infrastruktur Desa.
- Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara.
- Lampiran 8. Surat Keterangan Hasil Turnitin.
- Lampiran 9. Kartu Konsultasi Skripsi.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul untuk menghindari kesalahpahaman dan sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, maka penulis merasa sangat perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi bagian dari judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **“Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”**. Adapun uraian pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu, sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi merupakan terjemahan dari bahasa inggris yang berasal dari kata *implementation* yang artinya pelaksanaan¹. Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.²

¹ Jhon M. Echolas dan Hasan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 313

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 352

2. Asas Tertib Kepentingan Umum

Asas Tertib Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.³

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan Masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴ Asas tertib kepentingan umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepentingan masyarakat dalam membangun infrastruktur Desa yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Desa

3. Pembangunan Infrastruktur Desa

a. Pembangunan

Pembangunan adalah proses atau cara tumbuh, bertambah, dan berkembang, pertambahan, bertambah dan menjadi banyak, perihal pembangunan, proses membangun mencapai kemajuan, perkembangan dan sebagainya, atau menumbuhkan segala sumber daya yang tersedia agar bertambah menjadi banyak, namun dapat diambil pembangunan berarti perubahan.⁵ Pembangunan yang dimaksud peneliti adalah suatu proses untuk melakukan perubahan baik berupa pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas fisik.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

⁵ PJS, PWP, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : 2008), h. 134

b. Infrastruktur

Infrastruktur (*infrastructure*), menurut definisi *oxford dictionaries* adalah struktur fisik dan organisasi dasar (seperti bangunan, jalan, pasokan energi) yang diperlukan untuk beroperasinya masyarakat dan institusi.⁶ Menurut peneliti infrastruktur adalah struktur fisik berupa jalan, jembatan, bangunan, pengairan, pelayanan transportasi atau sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan beroperasinya suatu masyarakat dan instansi desa.

c. Desa

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶ Sulistijo S M, Budi Santoso, *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 1

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Suatu Undang-Undang yang membahas tentang Desa terdapat di dalamnya membahas tentang pembangunan Desa. Penetapan Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul serta hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁸

Jadi dengan demikian, maksud penjelasan dari judul skripsi “Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 11.

Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)” adalah untuk mengetahui pengimplementasi asas kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Tegal Binangun Kabupaten Tanggamus dan kemudian akan ditelaah dalam pandangan fiqh siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi bagi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

- a. Penelitian terhadap penerapan Asas tertib kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur desa ini sangat penting dilaksanakan karena asas tertib kepentingan umum dapat menerapkan pemerintahan yang baik, dimana jika asas ini dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa akan lebih berdaya guna, berfungsi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai aspek masyarakat. Selain itu dalam penerapannya juga dapat memajukan perekonomian serta pembangunan nasional, juga terhindar dari penyelewengan dana-dana yang setiap tahunnya digelontorkan oleh negara untuk pembangunan Desa.

- b. Masalah pembangunan infrastruktur Desa ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ini.

2. Secara Subjektif

Penulis memiliki beberapa alasan yang dapat diuraikan dalam subjektif ini, sebagai berikut:

- a. Kajian tema tentang implementasi asas tertib kepentingan umum dalam pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Perspektif Fiqh Siyasah studi Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, menurut penulis sangat menarik untuk diteliti dan dikaji.
- b. Belum adanya pembahasan pokok permasalahan tentang “Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”, sehingga penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul Skripsi.
- c. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang selama ini ditekuni oleh penulis yaitu jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah syar’iyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan, sedangkan Pemerintahan Desa merupakan tingkat unit paling bawah dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Pada tingkat yang paling bawah ini Desa seharusnya memiliki tatanan pemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai sarana prasarana infrastruktur yang memadai guna untuk memenuhi kepentingan umum dalam masyarakat di Desa tersebut.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional yang mengatur penyelenggaraan pemerintah Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 ayat 1 ini mendefinisikan bahwa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia bahwa Desa telah berkembang, terbukti dalam perjalanan penyelenggaraan Desa yang mengalami perubahan dari satu periode ke periode yang lain, Desa merupakan kesatuan otonom yang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

tangganya sendiri. Desa atau nama lainnya berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing berdasarkan hak asal usul yang diakui oleh negara berdasarkan amanah dari konstitusi, serta Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang mana masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah.

Pemerintah Desa memiliki peran yang penting untuk pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidupnya, melalui penanggulangan kemiskinan, penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara terukur dan berkelanjutan.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁰ Pembangunan Desa sangatlah penting demi mewujudkan pembangunan Desa dengan baik haruslah memiliki beberapa asas salah satunya adalah asas tertib kepentingan umum. Asas tertib kepentingan yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih menekankan pembangunan infrastruktur demi menjalankan asas kepentingan umum tersebut sehingga tercapai keterbukaan atau menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

aparatur atau pemerintahan Desa dalam menjalankan pembangunan Desa yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat.

Penyelenggaraan pembangunan Desa dalam masyarakat atau pemerintahan yang terkait haruslah memperhatikan hukum pemerintahannya dalam Islam, agar tercapai sesuatu penyelenggaraan pembangunan Desa serta pemerintahan Desa yang baik dan juga sejalan dengan anjuran agama Islam. Berdasarkan dalam ayat Al-Qur'an dapat ditemukan tentang beberapa nilai dasar pembangunan dengan konsep syura. Ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an Q.S Ali Imron ayat 159 :



.....الْأَمْرِ فِي وَشَاوِرْهُمْ
“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”¹¹

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum penyelenggaraan pemerintah itu haruslah sesuai dengan kepentingan serta keputusan bersama dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan umum, meninggalkan yang tidak berguna sebagai alat tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dari itu pemerintahan yang transparansi dalam Desa harus ditumbuhkan sebagai dasar suatu pemerintahan yang baik.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi bukti ketegasan komitmen pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk

¹¹ Al-Qur'an Surat Al-Imron [3] Ayat 159

melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Era otonomi daerah saat ini, Desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang bersifat umum. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 ayat mendefinisikan bahwa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia.¹² Pentingnya peraturan Desa ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat Desa, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan pembangunan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang Desa ini mempertegas posisi Desa sebagai sebuah identitas dengan adanya kewenangan Desa dan sejumlah lain seperti mengakui hal asal usul Desa serta dukungan dana dan penghasilan aparatur Desa akan mendorong terjadinya pembangunan Desa yang lebih partisipatif

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan Desa.¹³

Sebagaimana pelaksanaan amanat yang telah dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintahan Desa, pemerintah Desa mempunyai wewenang untuk menegaskan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S An-Nisa:58).¹⁴

Ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebaunya.¹⁵

¹³ Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja, 2016), h. 188

¹⁴ Al-Qur'an Surat An-Nisa [4] Ayat 58

¹⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'ah Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2017), h. 2.

Berdasarkan ayat di atas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang juga mengatur pembangunan Desa di dalamnya diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk menjalankan pembangunan infrastruktur desa dengan baik dan amanah. Apabila pembangunan infrastruktur desa dijalankan dengan baik juga akan mewujudkan pembangunan nasional yang baik pula karena desa bagian terbawah dari pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”.

D. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana implementasi asas tertib kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, di Pekon Tegal Binangun Kabupaten Tanggamus.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap pengimplementasian asas tertib kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur Desa pada Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

G. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Untuk mengetahui dan memberikan masukan bagi pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa, serta Desa agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan asas kepentingan umum sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa supaya dapat membangun infrastruktur Desa yang lebih baik lagi dari sebelumnya
- b. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan khasanah pengetahuan tentang Undang-Undang Desa khususnya dan masukan bagi pemerintah Desa serta masyarakat tentang pandangan Fiqh Siyasah berkaitan dengan asas kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur Desa.

2. Manfaat secara praktik :

- a. Sebagai kontribusi pemikiran keilmuan di bidang hukum, khususnya tentang implementasi asas kepentingan umum dalam infrastruktur Desa dan sebagai referensi untuk dijadikan penelitian lanjutan.
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis yaitu sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan

Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini sering kali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknis penelitian hal ini disebabkan ke tiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.¹⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden¹⁷. Penelitian ini dilakukan di Pekon Tegal Binangun, data yang diteliti adalah data berupa pelaksanaan maupun penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Desa, dikuatkan dengan wawancara terhadap pihak yang terkait sebagai informan atau responden dari pertanyaan yang peneliti berikan. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, sedangkan penulis mencari juga data dari

¹⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), h. 26

¹⁷ *Ibid*, h. 12

buku-buku hukum dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian penjelasan tersebut sebagai data sekunder.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini bersifat deskriptif (menggambarkan) analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan penjelasan data yang telah ada. Data-data yang didapat di lapangan oleh peneliti sebagai rujukan untuk selanjutnya di analisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan isi penelitian. Bentuk dari penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis, yaitu peneliti yang harus berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang bagaimana asas tertib kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur desa di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian di atas dapat dipahami bahwa populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti secara jelas.¹⁸ Adapun populasi

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke XV, 2012), h. 194-197

dalam penelitian ini adalah terdiri dari masyarakat yang tinggal di Pekon Tegal Binangun yang terdiri dari penduduk laki-laki 787 orang dan penduduk perempuan 773 orang dengan total jumlah keseluruhan populasi 1560 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang di ambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.¹⁹

Adapun cara dalam penentuan sampel, penulis menggunakan cara teknik *purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* adalah teknik berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkutan paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁰ Pada penelitian ini yang dijadikan sampel adalah penanggung jawab Pekon, sekretaris Pekon, kepala urusan bidang perencanaan pembangunan, BHP dan LPM sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat, dan 2 masyarakat Pekon Tegal Binangun Tanggamus dengan total sampel 7 orang.

3. Data dan Sumber Data

¹⁹ Susiadi, *Ibid*, h. 120

²⁰ Susiadi, *Ibid*, h. 130-131

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data yang akan ada pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu suatu data penelitian yang diperoleh atau bersumber secara langsung dari objek penelitian maupun yang dikumpulkan dari wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang dihasilkan dari wawancara dengan aparaturnya Pekon atau perangkat Pekon, serta masyarakat ataupun tokoh masyarakat Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dan tokoh-tokoh tertentu yang ada di wilayah tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis²¹. Adapun referensi yang penulis gunakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, buku pedoman penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan buku hukum pemerintahan Desa serta buku-buku dan materi pendukung lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

²¹ Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Raktik Tengkulak*, IAIN Raden Intan Lampung, (Bandar Lampung, 2015), h. 6

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.²² Alat pengumpulan data yang dibenarkan akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan.²³

Berikut teknik pengumpulan data:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁴ Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi-informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survei.²⁵

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara yang bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi tetap mengingat apa saja data yang diperlukan juga sesuai dengan

²² Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 402

²³ Sujarweni V Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31

²⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 83

²⁵ Matri Sangarimbun, Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survey* (Jakarta : PT. Pustaka LP3ES, 1995), h. 192

pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Peneliti tidak terikat dengan batasan-batasan namun tetap sopan sehingga proses wawancara bisa berjalan luwes dan tidak kaku. Adapun yang akan diwawancarai atau dimintai data atau sumber adalah aparatur Desa, kepala Pekon/Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang berperan dalam struktur Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran²⁶. Dalam menggunakan metode observasi (pengamatan) cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format-format atau blangko pengamatan sebagai instrumen²⁷. Peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian, dan meminta data dari aparatur Pekon yang bersangkutan untuk dilakukan pencatatan hal yang terkait dengan penelitian.

c. Dokumentasi

²⁶ Abdarrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

²⁷ Suhaini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), h. 272

Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen atau arsip yang ada di lokasi penelitian.²⁸ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data baik berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen tertulis dalam pelaksanaan asas kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur Desa di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah pengecekan data yang telah di kumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Selain itu juga *editing* adalah salah satu cara untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi sehingga kekurangan dapat di lengkapi atau di perbaiki.²⁹ Peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang telah terkumpul seperti profil Pekon, anggaran pembangunan, agar menghilangkan kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan peneliti melakukan pemeriksaan data pada hasil wawancara terhadap narasumber.

b. *Classfying* (Klasifikasi)

²⁸ *Ibid*, h. 112.

²⁹ Susiadi, *Ibid*, h. 12.

Classfying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.³⁰ Hal ini dilakukan supaya data yang telah diperoleh agar memudahkan untuk dibaca dan dipahami, juga memberikan informasi yang objektif. Data tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang didapat saat wawancara dan yang diperoleh dari referensi.

c. Kesimpulan

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu langkah terakhir pada proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan dipakai oleh peneliti untuk menjadi objek penelitian.

6. Metode Analisa Data

Proses analisa data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.³¹

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105

³¹ *Ibid*, h. 190

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya akan di analisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berpikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang bersifat umum.³²

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, di pisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.³³ Peneliti menganalisis hasil dari wawancara dan pengamatan di lapangan menggunakan penjabaran yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Desa.

7. Pemeriksaan keabsahan data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan oleh penulis yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.³⁴

³² Susiadi, *Ibid*, h. 5

³³ *Ibid*, h. 4

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 327

Peneliti menerapkan triangulasi sumber, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan,
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁵

Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, atau membandingkan antara data hasil pengamatan (observasi) dengan pendapat yang didapat dari hasil wawancara terhadap

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 178.

informan yang sebelumnya, sebelum adanya wawancara tersebut agar
mendapat hasil penelitian yang relevan dan benar dengan keadaan yang
ada di lapangan.





BAB II KAJIAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Pembangunan Infrastruktur Desa

a. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

Istilah Desa secara etimologis berasal dari kata Swadesi bahasa sangsekerta yang berarti wilayah, tempat atau bangunan yang mandiri dan otonom.³⁶ Istilah Desa dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga mempunyai sistem pemerintahan sendiri.³⁷ Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang pemahaman yang mendalam bahwa institusi Desa bukan hanya sebagai entitas administrative (*administrativ entity*), tetapi sebagai entitas hukum (*legal entity*), yang berarti harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan.

³⁶ P.J Zoetmulder Bekerja Sama Dengan S.O.Robson, *Kamus Jawa Kuno Indoneia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h. 212.

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja Sama Dengan Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 226.

Desa menurut Mashuri Maschab,³⁸ apabila membicarakan Desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relative homogeny, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relative rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, Desa sebagai lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, Desa merupakan satu lingkungan ekonomis, di mana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.

Ketiga, pengertian secara politik, di mana Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari

³⁸ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Polgov, Fisipol Ugm, Yogyakarta, 2013, h. 1-2.

pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini Desa sering merumuskan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.³⁹

Menurut Bintaro, Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, dan kultur yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.⁴⁰

Segi geografis mendefinisikan Desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisografis, sosial ekonomi, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.⁴¹

Unsur yang harus ada dalam suatu Desa adalah tanah-tanah yang produktif ataupun tidak termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat, penduduk, tata kehidupan masyarakat. Istilah Desa hanya dikenal di wilayah Jawa, sedangkan sebutan Desa yang berbeda di tinjau dalam sudut pandang suatu daerah misal: Di daerah Batak, daerah hukum setingkat dengan Desa disebut

³⁹ *Ibid.* H. 1-2

⁴⁰ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 4

⁴¹ Bintaro R, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1983), h. 15

Kuta atau Huta. Di daerah Aceh disebut Gampong atau Meunasah. Di daerah Minahasa disebut Wanua. Di daerah Ujung Pandang diberi nama Gaukang. Di daerah Sumatera Selatan daerah hukum setingkat dengan Desa biasa disebut dengan Dusun dan Marga. Di daerah Lampung sendiri dinamakan Tiuh bagi masyarakat hukum adat Pepadun dan Pekon bagi masyarakat hukum adat Lampung Sebatin seperti daerah Kabupaten Tanggamus, selanjutnya penulis akan menyebut Desa sama dengan Pekon.

Pekon adalah pembagian wilayah administratif pada beberapa kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia, seperti di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat. Pekon sama dengan sebutan Desa, yakni pembagian administratif di bawah Kecamatan. Pekon dipimpin oleh Kepala Pekon atau Peratin, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) “ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁴²

Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal ini menyebabkan Desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal.⁴³

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁴ Penyelenggaraan urusan pemerintah Desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dikenal dengan Badan HIPPUN Pekon (BHP) memiliki tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah ditampung oleh Kepala Desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan Desa dan APBdes.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di sebutkan pada pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah;

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴³ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.⁴⁵

Berdasarkan pasal 24 c terdapat asas tertib kepentingan umum penting adanya pembangunan infrastruktur desa berdasarkan kepentingan umum, sesuai dengan kebutuhan dari pada masyarakat umum dan bukan untuk golongan tertentu saja.

b. Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalan pem dan akhiran an, guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun setidaknya-tidaknya mengandung empat arti. *Pertama*, dalam arti sadar atau siuman. *Kedua*, dalam arti bangkit atau berdiri. *Ketiga*, dalam arti bentuk. *Keempat*, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

membina. Pembangunan meliputi pula segi anatomi (bentuk), fisiologik (kehidupan) dan behavioral (perilaku).⁴⁶

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴⁷

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan harusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.⁴⁸

Pembangunan infrastruktur Desa merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana yang ditempuh oleh suatu negara. Pembangunan itu sendiri terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

⁴⁶ Ndara Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 132.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴⁸ Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Grafindo Ilmu, 2006),

Pembangunan fisik adalah pembangunan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat misalnya berupa:

- 1) Prasarana perhubungan seperti jembatan, jalan.
- 2) Prasarana sosial seperti gedung sekolah, kantor pemerintahan, rumah-rumah ibadah, dan puskesmas.
- 3) Prasarana lain seperti gedung pertemuan dan pasar.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak berwujud tapi bisa langsung dirasakan hasil manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan non fisik sering disebut juga dengan pembangunan masyarakat yaitu berupa:

- 1) Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana.
- 2) Pembangunan bidang keamanan serta ketertiban.
- 3) Pembangunan bidang keagamaan.
- 4) Pelayanan terhadap urusan masyarakat berupa pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran.
- 5) Pembuatan surat keterangan domisili, surat tidak mampu.

Berdasarkan penyelenggaraan pembangunan atau pengelolaan pembangunan infrastruktur Desa meliputi hal-hal yang harus diperhatikan seperti proses sebagai berikut:

- 1) Perencanaan

Perencanaan sebagai proses langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan di mana yang dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan Desa dan usulan masyarakat secara aspiratif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai pembangunan Desa.

Perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan suatu hal untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan akan dapat menjawab semua permasalahan, sebagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka dalam pembangunan Desa perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif, dan efisien seperti dalam penggunaan dana dan sumber daya. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana. Perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan di antara warga masyarakat dalam proses pembangunan.⁴⁹

⁴⁹ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Malang: Setara Pers, 2014), h. 7.

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan arah pembangunan Desa yang berarti memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengawasi langsung dalam pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mempunyai sifat penting yaitu:

- a) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk mendapatkan informasi apa saja dibutuhkan, bagaimana dengan kondisi yang ada di lapangan, dan mendapatkan respon terhadap masyarakat setempat.
- b) Masyarakat lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan langsung dalam proses persiapan hingga perencanaannya, sehingga masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk serta asal mula program pembangunan dan mempunyai rasa memiliki.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan pikiran serta mental/emosi seseorang dalam situasi kelompok, mendorongnya individu untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan yang sama serta ikut bertanggungjawab terhadap upaya tersebut. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dituangkan dalam musyawarah tingkat dusun, musyawarah tingkat pekon dengan keterlibatan masyarakat mempunyai arti penting dalam pembangunan infrastruktur wilayah. Berdasarkan musyawarah tersebut masyarakat dapat menyampaikan

aspirasi dan pendapat mereka karena kebutuhan mereka sendiri secara langsung sebagai objek yang terlibat dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hingga hasil pembangunan tersebut. Dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut akan tercapai suatu pemecahan masalah yang sesuai dengan cita-cita masyarakat bersama, musyawarah menghasilkan mufakat bersama merupakan bentuk dari hasil kerja sama dari masyarakat dan pemerintah, dapat saling percaya, terbuka, dengan tujuan bersama sehingga akan terbentuk asas tertib kepentingan umum yang baik dan transparan dalam pembangunan Desa.

Perencanaan tidak mesti terlaksana tanpa ada suatu alasan yang tepat, untuk itulah maka di dalam perencanaan sendiri perlu adanya alasan-alasan yang dapat menjadikan sumber terbentuknya perencanaan tersebut.

Adapun sebagai alasan untuk adanya perencanaan adalah:

- a) Adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- b) Adanya perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi. Perencanaan

pembangunan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.

c) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best alternatif*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*).

d) Perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usaha.

e) Adanya perencanaan maka akan ada suatu alat pengukuran atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi (*control/evaluation*).⁵⁰

2) Pelaksanaan

Pembangun Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana kerja pemerintah Desa.⁵¹ Pada tahap pelaksanaan perlu adanya pengawalan serta pengawasan oleh masyarakat di samping itu perlu juga diadakan pengamatan terhadap pengaturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Desa mempunyai tiga lembaga yang memiliki peran penting dalam tata kelola Desa yaitu berupa: Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau Badan HIPPUN

⁵⁰ Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1986) Cet Ke-9, h. 9.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemekonan (BHP), lembaga kemasyarakatan istilah lainnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepala Desa dan BHP mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala Desa dan BHP akan ditetapkan dalam bentuk peraturan Desa dan APBDes.

3) Pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa

Masyarakat Desa berhak ikut serta dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan Desa karena hal tersebut termasuk dalam partisipasi masyarakat. Memantau dan juga mengawasi dari awal perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.⁵² Jika aspek ini dapat tercapai maka akan tercapai juga asas tertib kepentingan umum serta menciptakan *good governance* dalam pemerintahan tingkat bawah yaitu Pemerintah Desa.

c. Pembangunan Infrastruktur Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁵³ Untuk meningkatkan kuliatas hidup dan kehidupan itu tentunya

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

membutuhkan sarana infrastruktur yang memadai, maka peran pemerintah diperlukan dalam menjalankan pembangunan infrastruktur Desa sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur agar pembangunan tepat sasaran dan lebih terarah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pembangunan Desa terdapat pada pasal 78 ayat 1 pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.⁵⁴ Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat pada Pasal 79 menjelaskan Pemerintahan Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Terdiri dari Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan ini diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tahap menyusun perencanaan pembangunan Desa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 80 ayat 1, pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.⁵⁵ Berdasarkan pada kebutuhan dari masyarakat Desa meliputi sebagai:

- 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa.⁵⁶

Tahap pelaksanaan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat pada pasal 81 yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, pembangunan melibatkan seluruh masyarakat Desa

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa pada program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.

Pada pasal 82 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pemantauan dan pengawasan dari pada pembangunan Desa di mana masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.⁵⁷ Masyarakat Desa memiliki hak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa, masyarakat ikut berpartisipasi untuk melaporkan hasil dari pemantauan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Serta pemerintah Desa juga wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 1 tahun Rencana Kerja Pemerintahan Desa beserta dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada masyarakat Desa.

Informasi tersebut diinformasikan melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat Desa harus ikut berpartisipasi juga dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan belanja pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

a. Pengertian Asas Tertib Kepentingan Umum

Asas tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.⁵⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pembangunan infrastruktur Desa sendiri jika dalam pelaksanaannya menerapkan asas kepentingan umum ini maka kecil kemungkinan akan adanya korupsi dan pembangunannya akan tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik pula.

Mendahulukan kepentingan umum itu termasuk dari pada melaksanakan asas pemerintahan yang baik yaitu untuk melayani masyarakat dengan maksimal, transparan, masyarakat juga ikut andil dalam menyuarakan pendapat serta melaksanakan dan juga mengawasi serta mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur itu sendiri. Berikut cara untuk mendahulukan kesejahteraan umum terdiri dari:

- 1) Aspiratif, yaitu masyarakat individu atau kelompok dapat mengemukakan pendapatnya tentang pembangunan infrastruktur Desa yang perlu dibangun, disampaikan kepada musyawarah dari tingkat dusun dalam pembangunan Desa.

⁵⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 Huruf C.

- 2) Akomodatif, yaitu menyesuaikan diri terhadap perubahan, baik perubahan alam ataupun kebutuhan dari pada masyarakat tersebut. Penyelenggaraan pemerintah Desa bisa mengakomodasi juga terhadap setiap masyarakat demi menuju kepentingan umum.
- 3) Selektif terhadap penyelenggaraan pembangunan yang berarti dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tersebut dibuat untuk kebutuhan seluruh masyarakat Desa bukan hanya untuk satu kelompok saja.

b. Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Pemerintah baik Pusat, Daerah, maupun Desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁹ Pelayanan tersebut termasuk pada pelayanan pembangunan publik atau pembangunan umum. Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah Desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga Desa baik langsung maupun tidak langsung.⁶⁰

Pembangunan infrastruktur Desa adalah proses kegiatan pembangunan infrastruktur yang berlangsung di Desa yang mencakup aspek sarana dan prasarana infrastruktur Desa. Pembangunan dalam bidang infrastruktur ini dimaksudkan demi mendukung kelancaran

⁵⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 103.

⁶⁰ *Ibid*, h. 104.

segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pembangunan infrastruktur Desa akan tepat sasaran terhadap masyarakat dan terlaksana dengan baik, dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien hasilnya apabila pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Untuk memungkinkan hal tersebut terjadi, maka yang diperlukan adalah adanya pelaksanaan asas tertib kepentingan umum dimana dalam pelaksanaan pembangunan perlu adanya partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan kebutuhan sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa diperlukan juga adanya keikutsertaan dari perangkat pemerintah Desa dan juga masyarakat Desa setempat. Perencanaan sebelum adanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum ini perlu memperhatikan hukum pemerintahan dalam Islam seperti musyawarah sehingga tercapai sesuatu yang baik sesuai keputusan bersama juga sejalan dengan Islam. Terdapat dalam Q.S Al-Syura ayat 38 menjelaskan tentang musyawarah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”⁶¹

Pengertian dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum penyelenggaraan pemerintah harusnya sesuai dengan hasil musyawarah, dengan musyawarah pemerintah dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dan partisipasi terhadap masyarakat dengan aksi atau membantu secara langsung dalam pembangunan tersebut dari sebagian rezeki. Selain itu pembangunan infrastruktur Desa seyogyanya juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga keinginan masyarakat melalui aspirasi yang dituangkan dalam musyawarah, disepakati dengan metode partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur menjadi hal yang utama untuk dijalankan demi adanya transparansi dan meminimalisir tindak penyimpangan dana juga tidak tepat sasaran pada program yang telah direncanakan. Masyarakat Desa hendaknya dijadikan sebagai aktor utama dalam pembangunan, sehingga infrastruktur yang terwujud merupakan pembangunan dari masyarakat, oleh, dan untuk masyarakat Desa.

⁶¹ Lihat Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Syura [42] Ayat 38

Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah haruslah memenuhi pokok tujuan dari pada musyawarah itu sendiri. Adapun dari substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Sesuai dan tidak bertentangan dari syariat Islam.
- 2) Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawah*).
- 3) Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*).
- 4) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*).
- 5) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*).⁶²

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa jika dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan asas tertib kepentingan umum dalam pembangunan maka akan memiliki manfaat terhadap masyarakat Desa itu. Manfaat terlaksananya pembangunan infrastruktur sebagai berikut:

- 1) Menunjang sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 2) Meningkatkan produktivitas masyarakat.

⁶² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Kencana, 2014), h. 7.

3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

4) Mempercepat pemerataan pembangunan suatu wilayah Desa.

Berdasarkan dari manfaat pembangunan infrastruktur Desa di atas membantu juga terlaksana tujuan negara dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dari itu pemerintah Desa bersama pusat harus meningkatkan program pembangunan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan pembangunan menurut Islam.

Tidak tersedianya infrastruktur Desa yang memadai akan berdampak buruk bagi suatu wilayah atau negara seperti rendahnya kualitas hidup, kesulitan dalam pemberantasan kemiskinan, serta menurunkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing, oleh karena itu setiap negara berupaya untuk terus menambah ketersediaan infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan, baik pembangunan ekonomi maupun sosial, guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya lebih sejahtera dan makmur.

3. Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Perspektif Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam.⁶³ Secara etimologis (Bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembaca, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁶⁴ Dengan kata lain *fiqh* menurut bahasa berarti pengertian atau pemahaman terhadap perbuatan dan perkataan manusia.

Secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama syara' hukum islama), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum yang khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).⁶⁵

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari pada ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *fiqh* disebut juga dengan hukum Islam.⁶⁶

Kata *Siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah

⁶³ *Ibid*, h. 2

⁶⁴ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), H. 21

⁶⁵ *Ibid*, h. 22

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 3

mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁶⁷ *Siyasah* secara terminologi adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum, dan peraturan yang sejalan dengan ajaran Islam guna untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi *Siyasah Syar'iyah* (*Fiqh Siyasah*) adalah “pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid” yang dimaksud dengan masalah umum bagi negara bagi negara, menurut Khallaf, adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai Undang-Undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijakan pelaksanaannya, maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 3

⁶⁸ Suyuti Pulungan, *Ibid*, h. 25.

Berdasarkan dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasah dari segi etimologi dan terminologi serta definisi yang dikemukakan para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya dari mereka ada yang menetapkan lima bidang, ada yang menetapkan empat atau tiga bidang pembahasan ruang lingkungannya. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi menjadi delapan bidang ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*.

Menurut Al-Mawardi, dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* lingkup kajian *fiqh siyasah* sebagai berikut:

- 1) *Siyasat Dusturiyat* (Siyasah Perundang-Undangan).
- 2) *Siyasat Maliyat* (Siyasah keuangan).
- 3) *Siyasah Qadha'iyat* (Peradilan).
- 4) *Siyasat harbiyat* (Siyasah Peperangan)
- 5) *Siyasat Idariyat* (Siyasah Administrasi).⁶⁹

⁶⁹ Suyuti Pulungan, *Ibid*, h. 39.

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Al-Siyasat Al-Syariyat* hanya membahas tiga bidang saja yaitu:

- 1) *Siyasat dusturiyat*
- 2) *Siyasat kharijiyat* (siyasah hubungan luar negeri)
- 3) *Siyasah maliyah*

Fiqh siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁷⁰ Bidang fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi kepada:

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan perseorangan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

⁷⁰ Suyuti Pulungan, *Ibid*, h. 40.

4) Bidang *siyasah idariyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

c. Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Terhadap Perspektif Fiqh Siyasah

Pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh dari berbagai aspek. Serta manusia ditempatkan sebagai fokus utama dari pada pembangunan. Menurut fiqh siyasah pembangunan infrastruktur dilakukan oleh manusia yang seharusnya mengejar satu tujuan bersama, yaitu: kesejahteraan umat. Oleh karenanya, konsep pembangunan infrastruktur bagian besar dari infrastruktur Desa dalam fiqh siyasah harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Allah SWT.

Penerapan siyasah tidak boleh bertentangan dengan dalil yang bersifat kulliy, yang memiliki nilai universal, sekalipun ia terikat oleh tarikan masa dan tempat tertentu, oleh karena itu asas tertib kepentingan umum ini menggunakan *metode al-maslahah al-mursalah* digunakan untuk mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang diatur oleh syariat Al-Qur'an dan sunah.⁷¹

Persyaratan yang dikemukakan oleh ulama Muhammad Abu Zahrah dan Abd Al-Wahab Al-Khalaf digabungkan maka menghasilkan persyaratan *al-maslahah al-mursalah* meliputi:

⁷¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 32.

- a) Keharusan menetapkan kemaslahatan yang sesuai dengan maqashid al-syariah, semangat ajaran, dalil kully, dan dalil qath'i (wurud dan dalalahnya).
- b) Keharusan menetapkan kemaslahatan yang meyakinkan. Artinya kemaslahatan tersebut didasarkan kepada penelitian ilmiah yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa ia benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan, dan menghindarkan kemudaratannya.
- c) Keharusan menetapkan kemaslahatan yang memberikan manfaat kepada sebagian besar, bukan sebagian kecil, masyarakat.
- d) Keharusan menetapkan kemaslahatan yang memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan, dalam arti dapat dilaksanakan.⁷²

Pembangunan spiritual dan materiil seharusnya tidak dipisahkan namun harus dibangun secara bersamaan. Pembangunan dalam pemikiran Islam merujuk pada pola pikir yang melekat pada ayat Al-qur'an dan sunah atau hadits. Sumber tersebut menjadi rujukan yang menjadi dasar dari upaya pembangunan sehingga menjadi awal dalam perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur Desa, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua aspeknya.

Ayat Al-qur'an membahas tentang pembangunan infrastruktur Desa terdapat pada Q.S Ar- Ra'd ayat 11 sebagai berikut:

⁷² *Ibid*, h. 33-34.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ

Artinya : “*sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*”⁷³

Berdasarkan ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.⁷⁴ Kaitannya dengan pembangunan infrastruktur pada Desa adalah tidak akan berubah dan maju suatu Desa bila masyarakat yang menempatinnya tidak peduli akan pembangunan Desanya, sebaliknya dari itu jika masyarakat Desa ikut berpartisipasi dan berupaya untuk membangun infrastruktur Desa maka akan maju, dan terpenuhi semua kelancaran kegiatan Desa serta membantu juga dalam pembangunan daerah.

Asas tertib kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur Desa berarti asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif di dalam pembangunan infrastruktur Desa. Terdapat dalam menjalankan asas tersebut harus sejalan dengan Islam.

⁷³ Lihat Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd Ayat 11.

⁷⁴ Wibawa, Samudra, *Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 7.

Hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkrit di dalam ruang lingkup pemerintahan Desa haruslah mengedepankan kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan, serta kemaslahatan yang umum didahulukan atas kemaslahatan yang khusus.

Berdasarkan pandangan Islam dalam melaksanakan asas tertib kepentingan umum sejalan dengan konsep musyawarah, dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah ini terdapat di dalamnya membahas tentang konsep syura yang sejalan asas tertib kepentingan umum. Kata syura berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.⁷⁵ Dengan demikian keputusan yang diambil dari musyawarah merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur Desa bagi kehidupan masyarakat Desa tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 214

Tinjauan pustaka dapat digunakan untuk mengetahui aspek dari orisinilitas dan kejujuran dalam menulis skripsi ini, dalam hal ini penulis menyadari bahwa substansi dan objek penelitian ini bukanlah hal yang baru di mana pada tinjauan pustaka penulis akan mendeskripsikan beberapa skripsi yang relevansi dengan judul penelitian ini, sebelum penulis menguraikan lebih lanjut perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah berjudul “Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”. Adapun karya lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

Murba, mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul skripsi “Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Eracinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”⁷⁶ penelitian ini memiliki dua pertanyaan penting, pertama bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur, kedua apa saja faktor-faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Eracinnong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melalui dua metode pengumpulan data yaitu secara primer melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan secara sekunder yaitu melalui kajian pustaka dari

⁷⁶ Murba, *Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Eracinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata, 2017, h. vii.

buku, jurnal, skripsi dan laporan dan situs internet yang terkait dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur di Desa eracinnong masih belum memenuhi harapan masyarakat (tidak optimal), beberapa program pembangunan infrastruktur yang belum terlihat ada perubahan dari beberapa tahun silam, seperti jalan, listrik dan jaringan yang masih belum terealisasi hingga saat ini bahkan beberapa tahun belakangan ini yang kurang mendapat perhatian khusus oleh pemerintah setempat, selanjutnya mengenai faktor penghambat berjalannya pembangunan infrastruktur di Desa eracinnong ada beberapa faktor yaitu 1) keterbatasan anggaran. 2) tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. 3) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada sehingga kondisinya cepat rusak. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah objek kajian ini terfokus pada penerapan asas tertib kepentingan umum jika dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur Desa sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih terfokus kepada pembangunan infrastruktur Desa dan faktor penghambatnya.

Anjar Kurniawan 1421020163, mahasiswa Program Studi Siyasaah Syar'iiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasaah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan

Kabupaten Lampung Selatan)⁷⁷, pada penelitian ini merujuk pada penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan literasi kepustakaan berupa buku, catatan maupun hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah terkumpul data penulis menganalisis data dalam penelitian menggunakan analisa data secara deduktif dan induktif kemudian mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan. Tujuan dari dilakukannya penelitian tersebut agar mengetahui dan melihat implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap pembangunan Desa dan dampaknya terhadap masyarakat Desa, serta agar dapat melihat bagaimana pandangan fiqh siyasah dustruriyah terhadap pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Banjar Sari. Dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yang membedakan adalah tempat penelitian, penelitian ini konsentrasi penulis terhadap pembangunan infrastruktur Desa karena dalam penelitian sebelumnya hanya membahas pembangunan Desa secara luas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta dalam penelitian ini penulis menambah asas tertib kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur Desa Tegal Binangun Kabupaten Tanggamus.

⁷⁷ Anjar Kurniawan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung: 2018, h. ii.

Dea Tachta Almira NIM. 1742143318, mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung dengan judul skripsi Peningkatan Infrastruktur Dalam Menunjang Perekonomian Desa Ngrance, Kecamatan Pakel Kabupaten Tulung Agung.⁷⁸ Dilatar belakangi peran Desa berpotensi untuk meningkatkan pembangunan nasional. Perencanaan sebagai kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan merupakan usulan yang menjadi kegiatan prioritas, diterapkan dari tingkat dusun, hingga Desa. Upaya pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan pemerataan pembangunan sebagai wujud keadilan pembangunan sehingga dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif. Teknik analisis data menggunakan data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder dari dokumen Dana Desa (DD) dalam kurun waktu dari tahun 2015, 2016, dan 2017 Desa Ngrance, Kecamatan Pakel Kabupaten Tulung Agung. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pada pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan dan menunjang perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan anggaran dan Dana Desa (DD) yang berdampak pada kualitas infrastruktur meningkat serta pemerataan pembangunan di Desa dapat optimal. Mempertimbangkan perencanaan pembangunan tahun lalu untuk ditetapkan pada tahun yang akan datang dalam

⁷⁸ Dea Tachta Almira, *Peningkatan Infrastruktur Dalam Menunjang Perekonomian Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulung Agung*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung, Tulung Agung, 2018, h. xv.

(MUSRENBANGDes) juga turut berperan dalam mensukseskan pembangunan Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini memiliki tujuan bahwa pembangunan infrastruktur itu dapat meningkatkan dan menunjang perekonomian Desa sedangkan penelitian penulis memberi gambaran bagaimana jika asas tertib kepentingan umum jika diterapkan dalam pembangunan infrastruktur Desa tidak terlepas dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peneliti memiliki judul “Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah Studi di Desa Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”. Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta pembangunan infrastruktur Desa yang membedakan skripsi ini dengan peneliti terdahulu adalah adanya asas tertib kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur Desa, perbedaan subjek penelitian, lokasi tempat penelitian dan judul yang berbeda. Di sini peneliti mengkaji lebih mendalam terkait “Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Hukum

- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'ah Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2017.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Muhammad Abdul, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah* Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2017.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sulistijo S M, Budi Santoso, *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Islam tentang Raktik Tengkulak*, IAIN RIL, Bandar Lampung, 2015.
- Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja, 2016.

Buku Umum

- Adisasmita, Rahardjo, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Grafindo Ilmu, 2006.
- Amin Suprihatini, *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.
- Bintaro R, *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 1983.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan* Jakarta: PT. Gunung Agung, 1986 Cet Ke-9.

- Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016.
- Jhon M. Echolas dan Hasan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Polgov, Fisipol Ugm, Yogyakarta, 2013.
- Mastri Sangarimbun, Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1995.
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Malang: Setara Pers, 2014.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Ndara Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- P.J Zoetmulder Bekerja Sama Dengan S.O.Robson, *Kamus Jawa Kuno Indoneia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- PJS, PWP, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : 2008.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke 14* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, cetakan ke XV, 2012.
- Suhaini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Sujarweni V Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Bekerja Sama Dengan Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Wibawa, Samudra, *Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Jurnal/ Skripsi/ Tesis

Anjar Kurniawan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Dea Tachta Almira, *Peningkatan Infrastruktur Dalam Menunjang Perekonomian Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulung Agung*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulung agung, Tulung Agung, 2018.

Murba, *Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Eracinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme

Wawancara atau Surat

Indah Kurniasari, Wawancara Dengan Kaur Perencanaan Pembangunan Desa Tegal Binangun Kabupaten Tanggamus, Tanggamus, 6 Oktober 2020.

Kharis Ahmad, Wawancara Dengan Sekretaris Desa Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, 14 Agustus 2020

Purwanto, Wawancara Dengan Penanggung Jawab Desa Tegal Binangun Kabupaten Tanggamus, Tanggamus, 20 Juli 2020.

Purwanto, Wawancara Dengan Penanggung Jawab Desa Tegal Binangun Kabupaten Tanggamus, Tanggamus, 6 Oktober 2020.

Rubiyatin, wawancara dengan LPM desa Tegal Binangun Kabupaten Tanggamus, Tanggamus, 6 Oktober 2020.

Sukidi, Wawancara Dengan Ketua BHP Desa Tegal Binangun Kabupaten Tanggamus, Tanggamus, 6 Oktober 2020.

Dokumen Profil Desa, Desa Tegal Binangun Kabupaten Tanggamus, Dicatat Tahun 2019

